PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Oleh :

DONA RIDWAN
2014/14060081

JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA"

NAMA	: DONA RIDWAN
BP/NIM	: 2014/14060081
KEAHLIAN	: EKONOMI PUBLIK
JURUSAN	: ILMU EKONOMI
FAKULTAS	: EKONOMI

Disetujui oleh :

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi

Melti Roza Adry, SE. ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Padang, Juni 2021

Pembimbing

Drs. Ali Anis, M.S
NIP. 195911291986021 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : **Dona Ridwan**

NIM/TM :**14060081/2014**

Keahlian : **Ekonomi Publik**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Fakultas : **Fakultas Ekonomi**

Universitas : **Universitas Negeri Padang**

Padang, Juni 2021

Tim Penguji :

Nomor	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Drs. Ali Anis, MS	
2	Anggota	Muhammad Irfan, SE. M.Si	
3	Anggota	Novya Zulva Riani, SE.M.Si	

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tigas akhir berupa skripsi dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara", adalah asli karya sendiri.
2. Karya ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan menyebutkan pengarang dan dicantumkan pada kepustakaan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini, saya bersedia bersedia menerima sanksi akdemik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Dona Ridwan

NIM. 14060081/2014

ABSTRAK

Dona Ridwan 14060081/2014 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Di Bawah Bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, M.S

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis : (1) Pengaruh pendapatan asi daerah terhadap (PAD) pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. (2) Pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. (3) Pengaruh dana alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. (4) Pengaruh dana bagi hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. (5) Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian ini adalah deskripstif dan asosiatif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu menggunakan 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan pendekatan *Random Effect Model (REM).*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (2) DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (3) DAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadapa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (4) DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, (5) PAD, DAU, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan lebih mengoptimalkan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, karena dengan begitu dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasli (DBH).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara"* dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku pembimbing yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa kepada Orang Tua dan Keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Melty Roza Adry, SE, M.E selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, SE, M.M selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Irfan, SE, M.Sc selaku dosen penguji pada Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan miral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Kak Lidya yang telah memudahkan urusan administrasi khususnya untuk Jurusan Ilmu Ekonomi.
8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 tanpa terkecuali.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari kalau skripsi ini masih begitu jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis mengharapkan saran dan juga kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Februari 2021

Penulis,

Dona Ridwan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR GRAFIK ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Kegunaan Penelitian 14

BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori 15
   1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 15
   2. Teori Harrod Domar 17
   3. Teori Pertumbuhan Agregat 20
   4. Teori Desentralisasi Fiskal 21
   5. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi 23
   6. Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi 27
B. Penelitian Terdahulu 30
C. Kerangka Konseptual 33
D. Hipotesis Penelitian 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35
B. Tempat dan Waktu Penelitian 35
C. Variabel Penelitian 35
D. Jenis Data dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Defenisi Operasional 38
G. Teknik Analisis Data 40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 53
B. Deskripsi Variabel Penelitian..... 56
1. Deskripsi PAD..... 57
2. Deskripsi DAU..... 60
3. Deskripsi DAK..... 63
4. Deskripsi DBH 66
5. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi 68
C. Analisis Indiuktif..... 71
1. Uji Pemilihan Model 73
2. Uji Regresi Panel..... 75
3. Koefisien Determinasi (R^2)..... 77
4. Pengujian Hipotesis..... 78
D. Pembahasan Hasil Penelitian 81
1. Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 81
2. Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 83
3. Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 85
4. Pengaruh DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara 85

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 87
B. Saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN..... 93

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan tahun 2015-2018..... 4
2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2016-2018..... 8
3. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara tahun 2012-2018 54
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018..... 56
5. Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018..... 61
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018..... 64
7. Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018..... 66
8. Angka PDRB ADHK Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018..... 69
9. Hasil Uji Chow..... 73
10. Hasil Uji Hausman 74
11. Hasil Estimasi Random Effect Model..... 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Konseptual Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 33
2. Diagram Pie Perbandingan Jumlah Observasi Dengan Nilai Lebih Besar dan Nilai Lebih Kecil Dari Nilai Rata-rata DAU Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara 60
3. Diagram Pie Perbandingan Jumlah Observasi Dengan Nilai Lebih Besar dan Nilai Lebih Kecil Dari Nilai Rata-rata DAK Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara 63
4. Diagram Pie Perbandingan Jumlah Observasi Dengan Nilai Lebih Besar dan Nilai Lebih Kecil Dari Nilai Rata-rata DBH Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara 65

DAFTAR GRAFIK

Grafik **Halaman**

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Sumatera Tahun 2014-2018 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh pada masing-masing wilayah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, kebijakan tersebut merupakan Otonomi Daerah. Ditetapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota membagikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat buat menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang digali di suatu wilayah, maka akan bertambah pendapatan daerah yang seharusnya diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Dwirandra, 2013).

Jaya (2014), menyatakan kalau perkembangan ekonomi merupakan pertumbuhan dari aktivitas perekonomian dimana hal tersebut berakibat pada jumlah produksi barang dan jasa yang terus menjadi meningkat sehingga kemakmuran masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi bisa tercapai lewat penerapan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, meningkatkan, serta menggali kemampuan yang dimiliki tiap-tiap daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan ataupun kemajuan pembangunan ekonomi disuatu wilayah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun. Dewi (2017) mengatakan kalau proses pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Terdapatnya pertumbuhan ekonomi adalah indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi di kepulauan Sumatera dari tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Sumatera Tahun 2015-2018

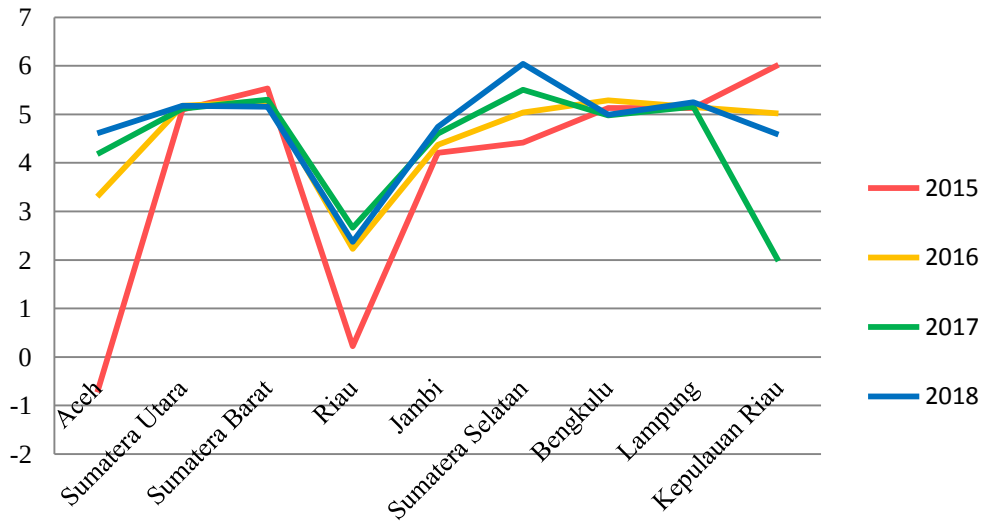

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Pada grafik di atas dapat kita lihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara empat tahun kebelakang sejak tahun 2015 justru cendrung stagnan sampai tahun 2018, yakni dari 5,1% di tahun 2015 meningkat menjadi 5,18% di tahun 2016 kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 5,12%, adapun pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sama dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,18%. Pertumbuhan ekonomi

Sumatera Utara empat tahun kebelakang merupakan salah satu pertumuhan ekonomi yang cendrung stagnan pada pertumbuhan diangka 5,1% jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di kepulauan Sumatera, misalnya pada provinsi Aceh yang justru cendrung menigkat tajam dari tahun 2015 sebesar -0,73% menjadi 4,61% di tahun 2018, dan juga pada provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi yang justru mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2018.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari setiap kabupaten/kota juga masih terdapat begitu banyak Kabupaten/Kota yang mengalami stagnan pada pertumbuhan ekonominya, dan juga masih terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang justru mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015-2018. Seperti kabupaten Labuhanbatu dari 5,04% pada tahun 2015 menjadi 5,06% pada tahun 2018, kabupaten Nias dari 5,52% pada tahun 2015 menjadi 4,95% di tahun 2018, kabupaten Mandailing Natal dari 6,21% tahun 2015 menjadi 5,79% tahun 2018, kota Sibolga dari 5,65% tahun 2015 menjadi 5,25% di tahun 2018, dan di berbagai kabupaten/kota lainnya.

Sumatera Utara ialah salah satu provinsi di Indonesia yang sudah merasakan dampak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Sistem otonomi wilayah menimbulkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengendalikan rumah tangganya sendiri serta mengurangi campur tangan pemerintah pusat, dengan terdapatnya rangsangan ini hendaknya memacu tiap wilayah untuk berlomba-lomba meningkatkan potensinya tiap-tiap daerah sehingga sanggup menimbulkan suatu percepatan ekonomi. Maka sangatlah

jelas bahwa otonomi daerah mempunya peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan suatu wilayah.

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara menurut Kabupaten /Kota Atas Dasar Harga Konstan (persen) Tahun 2015 – 2018.

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018
	Kabupaten				
1	Nias	5,52	5,03	5,01	4,95
2	Mandailing Natal	6,21	6,18	6,09	5,79
3	Tapanuli Selatan	4,86	5,12	5,21	5,19
4	Tapanuli Tengah	5,08	5,12	5,24	5,20
5	Tapanuli Utara	4,89	4,12	4,15	4,35
6	Toba Samosir	4,5	4,78	4,96	4,96
7	Labuhanbatu	5,04	5,06	5	5,06
8	Asahan	5,57	5,62	5,48	5,61
9	Simalungun	5,24	5,4	5,13	5,18
10	Dairi	5,04	5,07	4,93	5,01
11	Karo	5,01	5,17	5,21	4,55
12	Deli Serdang	5,24	5,32	5,1	5,15
13	Langkat	5,03	4,98	5,05	5,02
14	Nias Selatan	4,43	4,48	4,6	5,02
15	Humbang Hasundutan	4,63	5,02	5,07	5,04
16	Pakpak Bharat	5,95	5,97	5,94	5,85
17	Samosir	5,77	5,27	5,35	5,58
18	Serdang Bedagai	5,05	5,14	5,16	5,17
19	Batu Bara	4,14	4,47	4,11	4,38
20	Padang Lawas Utara	5,94	5,96	5,54	5,58
21	Padang Lawas	5,74	6,06	5,71	5,96
22	Labuhanbatu Selatan	5,14	5,19	5,09	5,27
23	Labuhanbatu Utara	5,18	5,21	5,11	5,20
24	Nias Utara	5,44	4,59	4,43	4,42
25	Nias Barat	5,25	4,83	4,81	4,77
	Kota				
26	Sibolga	5,65	5,15	5,27	5,25
27	Tanjungbalai	5,57	5,76	5,51	5,77
28	Pematangsiantar	5,24	4,86	4,41	4,80
29	Tebing Tinggi	4,9	5,11	5,14	5,17
30	Medan	5,74	6,27	5,81	5,92
31	Binjai	5,4	5,54	5,39	5,46
32	Padangsidimpuan	5,08	5,29	5,32	5,45
33	Gunungsitoli	5,79	6,03	6,01	6,03
	Sumatera Utara	**5,1**	**5,18**	**5,12**	**5,18**

Sumber : *BPS Provinsi Sumatera Utara 2015-2018*

Dari kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang cendrung stagnan ini seharusnya bisa lebih baik lagi semenjak berlakunya kebijakan otonomi daearah, dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari Pendapatan Asli Derah (PAD) yang tinggi, sebab peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerah masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah.

Anggaran daerah adalah rancangan keuangan yang dijadikan instruktur pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari : (1). Pendapatan Daerah, (2). Belanja Daerah, dan (3). Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD). (2) Dana Perimbangan. (3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Belanja Daerah terdiri dari (1). Belanja Tidak Langsung. (2). Belanja Langsung. dan (3). Belanja Modal. Selain itu Pembiayaan Daerah juga dikelompokkan menjadi (1). Penerimaan Pembiayaan dan (2). Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam menjalankan desentralisasi pemerintah daerah seringkali mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya penerimaan daerah dan dana belanja daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan publik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan dana perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Selain bertujuan untuk menambah APBD dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah.

Di dalam perode desentralisasi fiskal diharapkam terbentuknya kenaikan pelayanan diberbagai sektor yang terpenting pada sektor publik. Dengan kenaikan pelayanan publik yang terjadi akan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik untuk investor dalam membuka usaha di daerah. Cita - cita tersebut dapat tercipta apabila pemerintah berupaya menyalurkan berbagai sarana untuk investasi. Hal ini akan memberikan konsekuensi kepada pemerintah, dimana pemerintah harus membagikan dengan jumlah yang lebih besar untuk alokasi belanja pada tujuan ini. Pada satu sisi kebijakan desentralisasi fiskal dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolahan daerah, namun disisi lain akan memunculkan permasalahan baru, disebabkan tingkatan kesiagaan setiap daerah yang tidak sama. Perubahan alokasi belanja diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas – fasilitas modal. Menurut Saraswati, D. (2018) dana transfer dari Pemerintah Pusat sepatutnya digunakan secara efesien serta efektif oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Tetapi pada realitasnya

peningkatan pendapatan daerah tidak senantiasa berefek pada peningkatan pertumbuhan daerah tersebut.

Pembangunan infrastruktur industri akan berdampak cecara nyata pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pembelanjaan suatu daerah tertentu. Jika PAD bertambah, maka dana yang pemerintah dimiliki pasti akan lebih tinggi pula serta serta akan mampu meningkatkan kemandirian daerah tersebut, dengan hal tersebut akan mendorong inisiatif pemerintah daerah untuk lebih memanfaatkan potensi daerah tersebut dan juga akan mendorong peningkatan ekonomi (Dewi & Saputra : 2017).

Setelah sistem desentralisasi fiskal diberlakukan di Sumatera Utara, pendapatan asli daerah (PAD) di daerah tersebut cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar Rp4.954.833.101.000 ke tahun 2018 sebesar Rp5.638.960.579.000, peningkatan PAD ini menggambarkan Pemkab/Pemko Sumut memiliki kemampuan menggali potensi pendapatan disetiap daerah di Sumatera Utara, walaupun ada juga di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum mampu untuk meningkatkan pendapatan asli di daerahnya. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ini tentunya akan merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya ke publik sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat, bersamaan peningkatan pendapatan perkapita penduduk. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2016-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah,

yang menunjukkan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Menurut Jenis Penerimaan Tahun *2016-2018*

Jenis Penerimaan	2016		2017		2018	
	Penerimaan (Rp.000)	Kontribusi	Penerimaan	Kontribusi	Penerimaan (Rp.000)	Kontribusi
	(1)	%	(2)	%	(3)	%
A. Pendapatan Daerah	10.440.618.930	95,11	12.234.837.882	92,29	12.703.058.588	93,79
1. Pendapatan Asli Daerah	4.954.833.101	45,14	5.287.469.402	39,45	5.638.960.579	41,63
a) Pajak Daerah	4.446.394.796	40,51	4.823.549.139	35,99	5.219.324.543	38,53
b) Retribusi Daerah	34.505.501	0,31	34.289.674	0,26	36.614.846	0,27
c) Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	259.493.568	2,36	195.827.847	1,46	196.502.925	1,45
d) Lain-lain PAD yang Sah	214.439.236	1,95	233.802.741	1,74	186.518.265	1,38
2. Dana Perimbangan	5.219.273.756	47,55	6.928.134.940	51,69	7.055.134.429	52,09
a) Bagi Hasil Pajak	486.455.043	4,43	446.154.989	3,33	455.531.998	3,36
b) Bagi Hasil Bukan Pajak	24.628.176	0,22	14.702.345	0,11	58.317.019	0,43
c) Dana Lokasi Umum	1.604.505.673	14,62	2.629.224.545	19,62	2.629.224.545	19,41
d) Dana Alokasi Khusus	3.103.684.863	28,27	3.838.053.061	28,64	3.912.060.868	28,88
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	266.512.073	2,43	19.233.540	0,14	8.963.579	0,07
B. Pembiayaan Daerah	532.275.841	4,89	1.167.706.527	8,71	841.496.523	6,21
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	532.275.841	4,89	1.167.349.054	8,71	841.492.523	6,21
2. Penerimaan Lainnya	1000	0,00	357.472	0,00	0	0,00
Jumlah	**10.976.894.772**	**100**	**13.402.544.408**	**100**	**13.544.555.111**	**100**

Sumber : *BPS Provinsi Sumatera Utara 2016-2018*

[illegible] pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber dana terbesar kedua penerimaan daerah Provinsi Sumatera Utara setelah Dana Perimbangan. Pajak daerah merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PAD dari tahun 2016 sampai tahun 2018 yaitu sebesar, 89,74% dari tolal PAD tahun 2016, 91,23% dari total PAD tahun 2017 dan 92,56%

dari total PAD tahun 2018. Jumlah kontribusi PAD akan sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat (BPS Provinsi Sumatera Utara : 2018).

Walaupun demikian kemampuan keuangan daerah tidak cuma di ukur dari kemampuan untuk mengelola pendapatan asli daerah nya. Tetapi juga bisa dilihat dari dana perimbangan yang di transfer oleh pemerintah pusat ke daerah di Sumatera Utara untuk membiayai belanja daerah. Dalam realisasinya, (Manek, & Badrudin: 2016) menemukan kalau PAD hanya sanggup membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer Dana Perimbangan untuk tiap-tiap daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang 33 tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penerapan desentralisasi, supaya terciptanya rangsangan pertumbuhan ekonomi sebuah daerah.

Dari tabel 1.2 diatas dapat kita lihat Dana Alokasi Umum dari segi jumlah yang diterima pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018. DAU tahun 2016 sebesar Rp1.604.505.673.000, tahun 2017 Rp2.629.224.545.000 dan tahun 2018 sebesar 2.629.224.545.000 rupiah. Jika dilihat dari kontribusi terhadap total penerimaan daerah cenderung

berfluktuasi sejak tahun 2016 sampai tahun 2018. Tahun 2016 sampai tahun 2018 DAU adalah komponen kedua yang memberikan kontribusi terhadap total dana perimbangan setelah dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH).

Tidak hanya Dana Alokasi Umum (DAU) yang di berikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, terdapat dana berupa bentuk lain yang alokasikan kepada pemerintah daerah yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) ini adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kegiatan khusus sebagai urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus dari segi jumlah yang diterima kabupaten/kota di Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018. DAK tahun 2016 sebesar Rp3.103.684.863.000, tahun 2017 sebesar Rp3.838.053.061.000 dan tahun 2018 sebesar Rp3.912.060.868.000. Jika dilihat dari kontribusi terhadap total penerimaan daerah DAK juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 DAK adalah komponen pertama yang memberikan kontribusi terhadap total dana perimbangan setelah DAU dan DBH, dengan kontribusi sebesar 28,27% tahun 2016, 28,64% tahun 2017 dan 28,88% pada tahun 2018.

Besarnya DAK yang ditransfer kepemerintah daerah tersebut merupakan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah yang selama ini masih terjadi, khususnya pembangunan sarana dan prasarana fisik maupun

infrastruktur daerah. Besarnya DAK yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ditentukan menurut kriteria yang sudah ditetapkan, yaitu Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan DAK, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah jumlah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna peningkatan pelayanan publik (Manek & Badrudin: 2016).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksanaan desentralisasi. DBH dilaksanakan berdasarkan prinsip by *origin* (daerah penghasil) dan disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan. Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2016-2018. Berdasarkan tabel dapat diketahui dana bagi hasil (DBH) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung berfluktuasi, DBH tahun 2016 sebesar Rp511.083.219.000, tahun 2017 sebesar Rp892.309.978.000 dan tahun 2018 sebesar Rp513.849.017.000**.** Jika dilihat dari kontribusi terhadap total penerimaan daerah DBH juga cendrung berfluktuasi dari tahun 2016 sampai tahun 2018, kontribusi DBH tertinggi diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,65%.

Dari semua penjelasan tabel diatas menunjukkan bahwasanya pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang berupa, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dari segi jumlah yang di terima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, meskipun pendapatan dana bagi hasil (DBH) Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berfluktuasi, dimana DBH Provinsi Sumatera Utara tertinggi pada tahun 2016. Oleh sebab itu seharusnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara bisa lebih baik lagi. Mawarni & Abdullah : 2013, menyatakan bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Kuncoro menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Penelitan Adi dalam (Apriana & Suryanto : 2016), mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Realitas ini mendukung temuan Wong yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah daerah melakukan pembangunan pada sektor industri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?
2. Sejauhmana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara parsial di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dan dana perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi secara simultan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan hasil penelitian yang didapatkan berguna bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan Ilmu Ekonomi yaitu dalam Ilmu Ekonomi Publik.
2. Bagi peneliti sebagai bahan masukan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.
3. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
4. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian sejenisnya.
5. Bagi peneliti sendiri dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Menurut Saraswati : 2018, menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang berdampak pada peningkatan dari segi jumlah barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat dan juga kemakmuran masyaraka t meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut (Apriana & Suryanto :2016),

terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah :

a. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.
b. Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital.
c. kemajuan teknologi.

Pengertian dari pertumbuahan ekonomi sering dibedakan dengan pembangun ekonomi, pertumbuahn eknomi berkaitan dengan proses penambahan produksi jasa serta barang didalam kegiatan ekonomi penduduk, sementara itu pembangunan ekonomi menyimpan penjelasan yang lebih luas lagi. Pembangunan melibatkan proses perubanan pada pemakaian sumber daya produksi pada berbagai sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola perputaran pendapatan dan kekayaan diantara berbagai kelompok pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara merata. Namun demikian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal tersebut diperlukan karena berhubungan dengan kenyataan terdapat pertambahan penduduk. Sehingga menambah kebutuhan akan pangan, sandang, pendidikan, pemukinan dan pelayanan kesehatan akibat dari bertambahnya penduduk dengan sendirinya.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya proses pertumbuhan yaitu: faktor faktor non ekonomi dan faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada negara tertentu tergantung pada faktor ekonominya seperti sumber daya manusia, alam, modal usaha teknologi dan lainnya. Tetapi hal yang tidak mungkin terjadi adalah pertumbuhan ekonomi selama kondisi politik, lembaga sosia dan nilai-nilai moral dalam suatu negara tidak menunjang (Jhingan, 2013).

2. Teori Harrod Domar

Menurut Harrod-Domar, investasi adalah kunci pertumbuhan ekonomi, pada khususnya mengenai sifat ganda yang dimiliki oleh investasi, yaitu: (1) investasi dapat menciptakan pendapatan yang umumnya dikenal dengan dampak permintaan, (2) investasi dapat memperbesar kapasitas produksi prekonomian dengan kerja meningkatkan persediaan modal yang biasanya dikenal dengan dampak pengeluaran, maka dari itu output dan pendapatan nyata akan selalu meningkat selama investasi masih tetap berjalan (Jhingan.2013).

Model yang digunakan oleh Harrord dan Domar untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menciptakan pertumbuhan adalah :

a. Model Domar

Domar membangun modelnya dengan asumsi investasi disatu pihak kan mampu menghasilkan pendapatan dari pihak lain menaikkan kapasitas produktif, dimana apabila kenaikan kapasitas produksi dapat dijelaskan dari segi penawaran, contohnya: laju investasi adalah I, dan

kapasitas produksi tahunan per dolar modal baru yang ditanam rata rata sama dengan *s* (yang menggambarkan *output marginal* atau rasio kenaikan pendapatan nyata), sehingga I.s dolar pertahun merupakan kapasitas produktif dolar I yang diinvestasikan.

Akan terjadi persiangan antara investasi baru dengan investasi lama di pasar tenaga buruh dan faktor-faktor produksi lain dikarenakan dengan adanya investasi baru akan mengorbankan investasi lama. Karena adanya persaingan tersebut mengakibatkan *output* pabrik lama akan berkurang dan kenaikan *output* tahunan (kapasitas produksi) dari perokonomian akan sedikit lebih kecil dari pada I.s. Sehingga hal ini dapat dinyatakan Iσ, dimana σ (sigma) menggambarkan potensi netto produktivitas rata-rata sosial investasi (=ΔY/I). Sehingga Iσ lebih kecil dari I.s. Dimana Iσ merupakan jumlah netto potensi kenaikan *output* perekonomian tersebut. Hal inilah yang oleh Domar disebut dengan kenaikan *output* yang dapat dihasilkan oleh perekonomian dari sisi penawaran. (Jhingan,2013).

Domar menggambarkan kenaikan yang diperlukan dalam permintaan *agregat* menggunakan pengali (multiplier) Keynesian. Misalkan kenaikan rata-rata dinyatakan dengan ΔY dan kenaikan dalam investasi dengan ΔI dan kecenderungan menabung dengan α (=ΔS/ΔY). Maka kenaikan pendapatan itu akan sama dengan multiplikator (1/α) kali kenaikan dalam investasi, sehingga : $\Delta Y = \Delta I \frac{1}{a}$

b. Model Harrod

Terdapat 3 macam laju pertumbuhan yang didasarkan pada model Harrord, yaitu: (1) laju pertumbuhan aktual (G), yang ditentukan oleh rasio tabungan dan rasio modal *output,* dimana laju ini akan menunjukkan variasi siklis jangka pendek dalam laju pertumbuhan. (2) laju pertumbuhan terjamin (Gw), yang merupakan laju pertumbuhan pendapatan kapasitas penuh suatu perekonomian. (3) laju pertumbuhan alamiah (Gn), ini dianggap sebagai optimum kesejahteraan atau disebut juga dengan laju pertumbuhan potensial atau laju pertumbuhan pekerjaan penuh.

Model Harrord dalam laju pertumbuhan aktual (G), yaitu GC = S, dimana G ini adalah laju pertumbuhan *output* dalam peride waktu tertentu yang biasa dinyatakan sebagai ΔY/Y, C ialah tambahan netto terhadap modal yang diartikan sebagai rasio investasi terhadap kenaikan pendapatan, yaitu I/ΔY, dan S merupakan kecenderungan menabung rata-rata yaitu S/Y. Sehingga dengan rasio tersebut akan diperoleh I = S yang artinya tabungan sama dengan investasi, dimana hubungan tersebut dapat terjadi apabila dengan syarat S tergantung Y, I tergantung pada tambahan pendapatan (ΔY), yang biasanya digunakan sebagai prinsip percepatan.

Laju pertumbuhan terjamin terjadi disebabkan kepuasan produsen atas apa yang mereka kerjakan sehingga disebut juga sebagai ekuilibrium usaha atau permintaan diduga cukup tinggi oleh para pengusaha untuk menjual apa yang sudah diproduksi dan pengusaha ini

akan terus berproduksi dengan laju pertumbuhan yang sama sehingga permintaan dan penawaran selalu berapa pada titik ekuilibrium. Dengan persamaan:

$$Gw\ Cr = s$$

Gw diartikan sebagai laju pertumbuhan pendapatan dalam kapasitas penuh atau laju pertumbuhan terjamin yang akan semuanya memanfaatkan stok modal yang sedang membengkak sehingga akan dapat memuaskan para pengusaha atas jumlah investasi yang mereka tanam (Gw = nilai $\Delta Y/Y$), dan Cr merupakan modal yang dibutuhkan, menunjukkan jumlah modal (rasio modal *output*).

3. Teori Pertumbuhan Agregat

Glasson (Dalam Lucky, 2011) menyatakan bahwa teori pertumbuhan regional jangka panjang harus memperhitungkan faktor-faktor yang dianalisis dalam jangka pendek yang diasumsikan konstan, seperti penduduk, upah, harga, teknologi, dan disitribusi pendapatan. Mobilitas faktor-faktor terutama tenaga kerja dan modal harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pada umumnya banyak ahli yang sependapat bahwa pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen atau eksogen, yaitu faktor-faktor yang berasal dari daerah bersangkutan maupun faktor-faktor yang berasal dari luar daerah atau kombinasi dari keduanya. Faktor-faktor penting yang menjadi penentu dari dalam daerah meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Sedangkan salah satu faktor penentu yang berasal

dari luar daerah adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Suatu pendekatan yang lebih baru untuk menjelaskan faktor penentu endogen dari pertumbuhan ekonomi regional adalah penggunaan model ekonomi makro. Model ini berorientasi pada segi penawaran dan berusaha menjelaskan *output* regional menurut faktor-faktor regional tertentu yang masing- masing dapat masing-masing dapat dianalisa dengan cara sendiri-sendiri (Glasson,1997) dan dapat dituliskan sebagai berikut :

On = Fn (K, L, Q, Tr, T, So)

Keterangan :

On = *Output* potensial dari daerah n
K = Modal (Kapital)
L = Tenaga Kerja
Q = Tanah
Tr = Sumber daya pengangkutan
T = Teknologi
So = Sistem sosial politik

Apabila dirumuskan menurut faktor-faktor yang lebih penting dan lebih mudah dikuantitaskan, maka rumus mengenai persamaan pertumbuhan sebagai berikut:

On = a n k n + (1-an) ln + tn

Keterangan :

O, k, l, t = Tingkat pertumbuhan *output*, modal tenaga kerja dan teknologi

a = Bagian pendapatan yang diperoleh modal (yakni produk marginal dari modal)

4. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Dewi & Suputra : 2017). Secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi ekonomi pertumbuhan (Dewi & Suputra : 2017). Fungsi utama dari desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Faridi : 2011).

Menurut (Dewi & Suputra : 2017), dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal. Infrastuktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi, dengan menyiapkan infrastuktur yang baik maka akan meningkatkan produktivitas (Modebe *et al*, 2012). Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan produktivitas ekonomi (Albatel, 2003).

Desentralisasi fiskal dikatakan menawarkan sejumlah manfaat bagi tata kelola sektor publik, termasuk pertumbuhan, akuntabilitas, dan responsivitas para pejabat pemerintah terhadap tuntutan lokal dan kebutuhan (Amagoh & Amin, 2012). Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

otonomi fiskal pemerintah daerah, dan pentingnya fiskal pemerintah daerah. Otonomi fiskal pemerintah daerah berkaitan dengan transfer fiskal antar pemerintah. Pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kepentingan fiskal terhubung langsung dengan tingkat tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat dari seluruh pengeluaran pemerintah (Aristovnik, 2012).

5. Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah (Jaya, Kartika dan Dwirandra : 2014). Pada UU pasal 157 No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 No. 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Pajak daerah

Jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 terdiri dari :

1) Pajak restoran
2) Pajak hotel
3) Pajak reklame
4) Pajak hiburan

5) Pajak penerangan jalan
6) Pajak Parkir
7) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

b. Retribusi daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek jenis pendapatan diretribusikan untuk kabupaten/kota. Retribusi daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang berasal dari retribusi.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Berdasarkan objek pendapatan yang mencakup jenis pendapatan ini dirincikan menurut :

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
3) Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4) Lain-lain PAD yang sah.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Soekarwo dalam (Saraswati, D. : 2018), upaya yang dilakukan pemerintah

daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
b. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Indikator variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat di hitung dengan rumus:

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatana Retribusi Daerah

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan dalam melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi PAD terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang bisa diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Dewi & Suputra : 2017).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pembelanjaan daerah. Bila PAD bertambah, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut akan lebih tinggi kemudian akan meningkatkan kemandirian daeraht, sehingga prsebut, sehingga pemerintah daerah akan lebih mencari ide untuk lebih menggali potensi - potensi wilayahnya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dewi & Suputra : 2017). Apriana & Suryanto (2016), menegaskan jika keberhasilan peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam mengendalikan perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan dalam perolehan kenaikan PAD.

Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan

ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi. Peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memakmurkan masyarakatnya. Masyarakatlah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan aktifitas investasi maupun belanja. Dewi & Suputra : 2017, menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Putri (2015) bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

6. Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Dana perimbangan adalah : "Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik Alfarisi, S. (2015). Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Teransfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah.

Pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil atau disebut juga dana bagian daerah merupakan sumber penerimaan yang ada pada dasarnya memperhatikan potensi daerah

penghasil (Djaenuri, 2012 : 100). Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas.

1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
2) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian sebagai berikut:
    1) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
    2) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil, dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.
3) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

b. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kapasitas fiskal diukur berdasarkan PAD dan DBH. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Tujuan dan fungsi dana alokasi umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang No. 33 tahun 2004).

Tahar & Zakhiya (2016), menyatakan bahwa terdapat komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yaitu PAD. Apabila peningkatan PAD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD.

B. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Febrian Dwi Prakarsa Iswan Noor (2014)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur	- PAD - Pengeluaran Pemerintah - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal - Pertumbuhan Ekonomi	- PAD berpengaruh secara kurang signifikan dan berpengaruh negatif - Belanja barang dan jasa berpengaruh secara positif dan signifikan - Belanja modal berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
2	Anitasari Ahmad Soleh (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu	- Pengelluaran Pemerintah - Pertumbuhahan Ekonomi	- Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu.
2	Rahmah AR Drs. Basri Zein M.Si (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil	- Pertumbuhan Ekonomi - PAD - DAU	- PAD,DAU dan DBH secara simultan berpengaruh

		Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh	- DBH	terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014 - PAD,DAU dan DBH secara parsial perbengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014
3	Ni Wayan Ratna Dewi, I Dewe Gede Dharma Suputra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	- PAD - DAU - DAK - Belaja Modal - Pertumbuhan Ekonomi	- Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Ardiani Maulidia Oktafia Aris Soelysto Zainal Arifin (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	- PAD - DAU - DAK - PDRB	- Hasil penelitian ini menghasilkan seluruh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto.
5	Kartini Katrina Mamuka Ita Pingkan (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan	- PAD - DAU - Belanja Modal - Pertumbuhan Ekonomi	- Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan

		Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara		terhadap pertumbuhan ekonomi - Dana alokasi umum berpengaruh positif dan sigifikan terhadap pertumbuhan ekonomi - Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga dana perimbangan dikarenakan pada umumnya nilainya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu dalam variabel yang digunakan adalah PAD dan Dana Perimbangan dengan indikator Dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH).

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi keterkaitan antara variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada kajian teori di atas. Keterkaitan variabel yang diteliti adanya pengaruh antara variabel independen yang menggunakan pendapatan asli daerah (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4) serta variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (Y). Kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

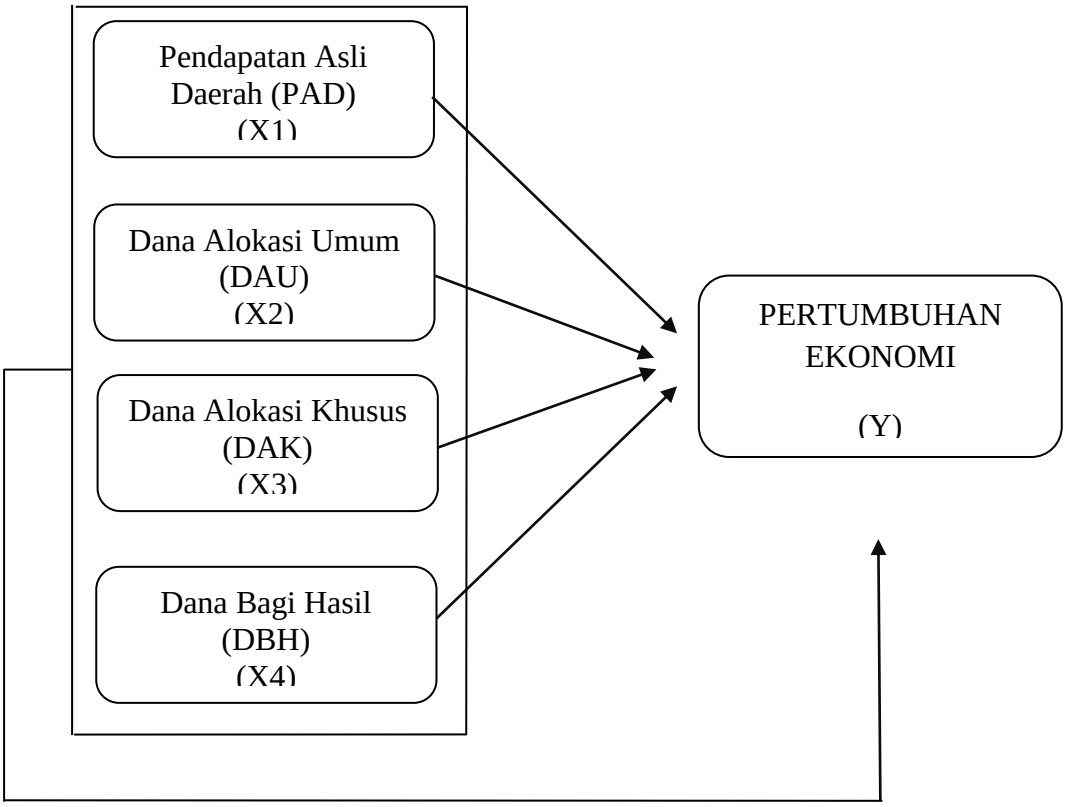

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dan baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah sebuah data empiris diperoleh. Dalam penelitian dapat dirumuskan hipotesis guna memberikan pedoman maupun arah dalam melakukan penelitian. Hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

   $H_o : \beta 1 = 0$
   $Ha : \beta 1 \neq 0$

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

   $H_o : \beta 2 = 0$
   $Ha : \beta 2 \neq 0$

3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

   $H_o : \beta 3 = 0$
   $Ha : \beta 3 \neq 0$

4. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

   $H_o : \beta 4 = 0$
   $Ha : \beta 4 \neq 0$

5. Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

   $H_o : \beta 1 = \beta 2 = \beta 3 = \beta 4 = 0$
   Ha : salah satu koefisien $\neq 0$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis Regresi Panel yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara selama 2 tahun peride penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Artinya, peningkatan PAD teidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin meningkat penerimaan DAU maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat di Provinsi Sumatera Utara.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Artinya, semakin meningkat penerimaan DAK dan juga DBH maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat di Provinsi Sumatera Utara.
4. Secara bersama-sama PAD,DAU,DAK dan DBH berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai Pendapatan Asli Derah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) maka saran yang diberikan adalah :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara hendaknya memberi perhatian yang lebih mendalam untuk *mereview* kriteria Pendapatan Asli Daerah dari sudut pandang kepentingan publik. Penciptaan sumber-sumber PAD baru secara relatif akan lebih baik daripada peningkatan tarif pajak dan dari sumber-sumber penerimaan lainnya. Pengenaan pajak serta retribusi hendaknya tidak semata-mata hanya untuk peningkatan kuantitas PAD tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemampuan untuk mencapai pemenuhan kepentingan publik.
2. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mengoptimalkan lagi untuk potensi-potensi yang ada didaerah sebagai pemasukan untuk pendapatan asli daerah. Pos-pos pendapatan asli daerah ini jika bisa dikelola dengan baik bisa merdampak pada peningkatan lapangan kerja artinya bisa menyerap tenaga kerja menekan angka pengangguran dan memicu pertumbuahan ekonomi.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil sebijak mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik.

4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik, serta menambahkan variabel lain, priode penelitian dan wilayah penelitian yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, S. (2015). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*). Jurnal Akuntansi, 3(1).

Akhirman, S. (2012). Sos., MM (2012) *Pengaruh PDB, jumlah penduduk, nilai ekspor, investasi (PMA, PMDN), laju inflasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2010.*

Albatel, A. H. (2003). *Government activity and policy and economic development in Saudi Arabia.* Journal of Economic and Administrative Sciences.

Amagoh, F., & Amin, A. A. (2012). *An examination of the impacts of fiscal decentralization on economic growth*. International Journal of Business Administration, 3(6), 72.

Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3*(2).

Apriana, D., & Suryanto, R. (2016). *Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Journal of Accounting and Investment, 11(1), 68-79.

Ardiansyah, V. A. Widiyaningsih. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Dearah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Simposium Nasional Akunstansi, 17.

Aristovnik, A. (2012). *Fiscal decentralization in Eastern Europe: trends and selected issues.* Available at SSRN 2187475.

Azzahra, Annora. 2015. Pepengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.

BPS Provinsi Sumatera Utara 2015-2017

Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). *Dampak dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi*. Jurnal Paradigma Ekonomika, 12(2), 67-76

Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. E-Jurnal Akuntansi, 18(3), 1745-1773.